

**KONSEP *AL-RADHA'AH* DAN HUKUM OPERASIONAL BANK ASI
MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab
dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DESRIKANTI BK
NIM: 10400110019

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Desrikanti BK, NIM: 10400110019, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, **“Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk disidangkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 15 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdillah Mustari, M. Ag.
NIP: 1977730710 200003 1 004

Achmad Musyahid, S. Ag., M. Ag
NIP: 19711013200003 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desrikanti BK
NIM : 10400110019
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 23 Desember 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Mannuruki II No.70 Makassar
Judul : Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI
menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 September 2014

Penyusun,

DESRIKANTI BK
NIM: 10400110019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Konsep *Al-Radha’ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”**, yang disusun oleh Desrikanti BK, NIM: 10400110019, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Makassar, 15 September 2014 M
20 Dzulqaidah 1435 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M. A	(.....)
Sekretaris	: Dra. Sohras, M. Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M. A	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabir Maidin, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Achmad Musyahid, S. Ag., M. Ag.	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M. A
NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul: **“Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”** Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ayahanda Tercinta (Basri Kasim) dan Ibunda Tersayang (Ratna Dewi) serta kakakku Agus Prayuda dan Dyan Aryanti, adikku Deri Lestari dan keluarga besar yang selalu mendo’akan serta memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Qadir Gassing, HT. MS. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Ali Parman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ayahanda Dr. Abdillah Mustari, M.Ag., dan Ayahanda Achmad Musyahid, S.Ag, selaku dosen pembimbing dan ketua jurusan dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi izin dipilihnya judul skripsi dan yang telah memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai skripsi ini kelar.
4. Dr. Muh. Sabir Maidin, M. Ag. Selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam pembuatan skripsi ini.

5. Ibu Maryam, SE, selaku staf Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah memfasilitasi dalam mengurus berkas-berkas kelengkapan penulisan skripsi.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu dan mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman satu angkatan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Angkatan 2010.
8. Saudara (i) KKN 49 beserta Ibu dan Bapak dusun Posko Desa Boddia, Galesong, Takalar terima kasih atas support kalian.
9. Yang Spesial Kepada Briptu Achmad, SH. Yang selama ini memberikan doa dan dukungan.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis mudah-mudahan hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. *Amin ya rabbal ,,alamin.*

Samata, 15 september 2014

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II KONSEP <i>AL-RADHA'AH</i> MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB	12
A. Konsep <i>Radha'ah</i> menurut Hukum Islam	12
1. Pengertian Hukum Islam	12
2. Pengertian <i>Radha'ah</i>	14
3. Konsep <i>Radha'ah</i> menurut Hukum Islam	16
B. Pandangan Ulama Empat Mazhab terhadap Kadar Sesusuan yang Mengharamkan Pernikahan	24
1. Biografi Ulama Empat Mazhab	24

	2. Pandangan Ulama Empat Mazhab tentang Kadar Sesusuan yang Mengaharamkan Pernikahan.....	36
BAB III	OPERASIONAL BANK ASI DAN STATUS KEMAHRAMAN PENERIMA DAN PENDONOR BANK ASI	43
	A. Bank ASI	43
	1. Sejarah Bank ASI	43
	2. Prosedur Pendonor dan Pengambilan Susu di Bank ASI ...	45
	B. Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI	47
	1. Pengertian Kemahraman.....	47
	2. Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI....	61
BAB IV	PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG BANK ASI	64
	A. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI.....	64
	1. Pendapat Ulama yang Membenarkan Adanya Bank ASI...	64
	2. Pendapat Ulama yang Tidak Membenarkan Adanya Bank ASI	65
	B. Konklusi Hukum Seputar Bank ASI.....	66
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	Daftar riwayat hidup	76

ABSTRAK

NAMA :DESRIKANTI BK
NIM :10400110019
JUDUL :Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab, Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Apa yang dimaksud *Al-Radha'ah* menurut pandangan Ulama Empat Mazhab?. 2) Bagaimana Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI?. 3) Bagaimana Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI?.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis, pendekatan Syar'i dan pendekatan Komparasi. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap putting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas.

Adapun implikasi dari penelitian ini ialah mengenai Permasalahan Bank ASI jika dikembalikan kepada hukum dasar persusuan maka memiliki konsekuensi-konsekuensi yang perlu mendapat perhatian dari umat Islam. Mengingat ajaran serta syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga soal kehormatan dan keturunan.

Dalam praktiknya di dunia barat, Bank ASI dalam prosedurnya menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dan ibu susu, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Jika terjadi pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalat, sebagaimana dikatakan dalam kaidah ushul "*Larangan dalam muamalah menunjukkan atas batalnya hal yang dilarang jika larangan tersebut menyangkut substansi akad*"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyusui anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan Air Susu Ibu (ASI) merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. ASI merupakan minuman dan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.¹ Hal ini dalam Hukum Islam disebut dengan istilah *radha'* (peyusuan).

Pengertian *radha'* (peyusuan) menurut Ulama ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya, dengan cara mengisap atau lainnya.² Sedangkan proses penyusuan dengan cara menuangkan ASI ke dalam mulut tanpa melalui peyusuan di sebut *al-wajur*, dan menuangkan ASI melalui hidung tanpa melalui penyusuan disebut *al-sa'ut*. Mengenal *al-wajur* dan *al-sa'ut* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Menurut imam Malik, proses *al-wajur* dan *al-sa'ut* dapat menyebabkan hubungan kemahraman atau nasab antara perempuan yang memiliki air susu dan bayi yang menghisap atau meminum susu dengan dua cara tersebut.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mendefenisikan *radha'* menunjukkan bahwa persoalan *radha'* tidak hanya dapat di pandang dari aspek air

¹Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), h. 30.

²Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahhab* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.

susu yang dikonsumsi oleh bayi tersebut, tetapi juga harus melihat dan memperhatikan bagaimana proses yang digunakan dalam *radha'* (penyusuan), misalnya menetek secara langsung atau menuangkan air susu ke kerongkongan.³

Dalam fikih Islam, persoalan *radha'* mempunyai dampak terhadap timbulnya hubungan kemahraman antara anak dengan ibu yang menyusui. Dengan menyusunya seorang anak kepada wanita lain maka menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusunya (anak susuan) beserta segenap keturunan dan kerabat ibu susuan sehingga haram bagi anak menikah.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-radha'* atau susuan. Menurut Hanafiyah bahwa *al-radha'* adalah seorang bayi yang mengisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa *al-radha'* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan *al-radha'* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan *al-radha'* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang mengisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.⁴

Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan umur ketika orang menyusui yang bisa menyebabkan kemahraman.⁵ Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi berumur dua tahun ke bawah.⁶ Allah swt berfirman dalam (QS. 2 [*al - Baqarah*] : 233

³Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Alih Bahasa, Ali Audah (Jakarta: Pustaka Lintera Antarnusa, 2001), h. 50.

⁴Cholil, Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Cet. II; Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 267.

⁵Cholil, Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, h. 268-270.

⁶Cholil, Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, h. 267.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit. Diponegoro, 2010), h. 37.

Bahwa di dalam pembolehan menjual ASI itu ada kemungkaran karena bisa menimbulkan rusaknya pernikahan yang disebabkan kawinnya orang sesusuan dan hal tersebut tidak dapat diketahui jika antara lelaki dan wanita meminum ASI yang dijual bank ASI tersebut.⁸ Namun, ada juga yang berpendapat bahwa menjual ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. Tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya.⁹

Muncul persoalan baru yang terkait dengan *radha'* yaitu adanya lembaga donor ASI atau di kenal sebagai Bank ASI.

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

⁸Masjfuk Zallum, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* [t.tp.: t.p.,t.t], h. 312.

⁹Masjfuk Zallum, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, h. 320.

¹⁰Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 120.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah Bagaimana Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab adapun sub masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud *Al-Radha'ah* menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab?
2. Bagaimana Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun judul penelitian ini adalah Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab. Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka akan di jelaskan definisi operasional dari judul diatas.

Al-Radha' (penyusuan) menurut ulama ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya, dengan cara mengisap atau lainnya.¹¹

Operasional ialah cara bekerja; gerak jangkau; lingkup.¹² Sedangkan Bank ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima simpan pinjam; kumpulan; bank mata, kumpulan (gugus) data; bank sirkulasi, bank yang mengedarkan uang.¹³ Sedangkan ASI singkatan kata dari Air Susu Ibu.

¹¹Zakariya Al-Ansari, *Fath Al-Wahhab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.

¹²Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamis Ilmiah Populer*, h. 549.

¹³Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamis Ilmiah Populer*, h. 299.

Bank ASI adalah merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.¹⁴

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi Ulama Empat mazhab yang diantaranya: Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah.

D. Kajian Pustaka

Adapun buku-buku atau kumpulan skripsi yang penulis dapatkan dalam kaitannya dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

Ulfatmi, Kementerian Agama RI dalam bukunya yang berjudul “*Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*”. Menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah estafet dalam rangkaian proses kehidupan manusia. Dari kecil, remaja, dewasa dan akhirnya melangsungkan perkawinan adalah mata rantai yang tidak terputus dari siklus yang secara umum diakui oleh manusia. Dalam konteks

¹⁴Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2003) h. 120.

demikian, pada dasarnya, manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa.¹⁵

Skripsi yang disusun Ali Asyar dengan judul: “*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibn Hazm)*”. Menurut *Ibn Hazm* bahwa secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa seseorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karena itu, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.

Skripsi yang disusun oleh Nurlaiy Hidayah dengan judul “*studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Batas Minimal Kadar susuan yang Mengharamkan Nikah*”. Menurut Ibnu Hazm bahwa susuan yang menyebabkan keharaman menikah adalah bila seorang perempuan memberi susuan sebanyak sepuluh kali. Adapun jika kurang dari itu maka pemberian tidak mengakibatkan haramnya menikah.

Di antara peneliti yang membahas tentang *radha'* atau susuan adalah skripsi dari Zainal Abidin “*Persengketaan Suami-Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu bagi bayi (Pasal 104 ayat 2 KHI studi Analisa)*”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang kebutuhan bayi terhadap ASI sebagai makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan dalam perkembangannya. Dalam skripsi tersebut juga dibahas tentang pengaruh ASI terhadap tubuh Bayi.¹⁶

¹⁵Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (studi terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota Padang)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 66.

¹⁶Zainal Abidin, “*persengketaan Suami-Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu bagi Bayi (studi Analisa pasal 104 ayat 2 KHI)*”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah, 2002), h. 66.

Di antara peneliti yang membahas tentang Bank Asi adalah Khotimatus Sa'adah dalam skripsi yang berjudul "*Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (studi Atas pemikiran Yusuf Qardawi)*". Menurut Qardawi, Bank ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur yang membutuhkan Air Susu Ibu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh, maka anak-anak yang minum dari bank ASI tidak menimbulkan hubungan mahram. Penyusun skripsi ini bertolak belakang dengan pendapat Qardawi, bahwa bayi yang minum dari ASI dianggap sebagai mahram karena bank ASI memiliki fungsi yang sama dengan konsep *Radha'ah*.¹⁷

Setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang sama atau serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini sama sekali belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*lybrary research*). Secara definitif, *lybrary reseacrh* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang

¹⁷Khotimatus Sa'adah, "*Bank ASI dan Implikasinya dalam hukum Perkawinan Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qardawi)*", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2004), h. 82.

sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan krisis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Konsep *Al-Radha'ah* Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Empat Mazhab dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lainnya.

2. Metode Pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Empat Mazhab. Maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Syar'i

Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (*syar'i*), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pendapat dari para Ulama Empat Mazhab Tentang Konsep *Al-Radha'ah* dan Hukum Operasional Bank Asi.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data-data yang memuat tinjauan hukum, terutama hukum islam.¹⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.¹⁹

a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.²¹ yang berlangsung

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:

a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah.

b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

¹⁸Abd. Kadir Ahmad, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*”, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012), h. 8.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h.253.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, h.253.

5. Metode Pengolahan data

Dalam pengolahan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:

- a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa data.
- b. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.²²

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan pengertian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa yang dimaksud Al-Radha'ah menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab.
2. Untuk mengetahui Hukum Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI.
3. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI

Dari penelitian ini, diharapkan pula dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang Konsep *Al-Radha'ah* menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab.
2. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana Pandangan Hukum Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI.
3. Memberikan Pemahaman kepada Pembaca tentang bagaimana Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI.

²²Abd. Kadir Ahmad, "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*". Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012). h. 8.

BAB II

KONSEP AL-RADHA'AH MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB

A. *Konsep Al-Radha'ah Menurut Hukum Islam*

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam Al-Quran kata hukum Islam tidak akan pernah didapatkan. Tapi beberapa istilah yang menyamakannya adalah, *syari'at*, *tasyri'* atau *syara'*, dan *fiqh*. Istilah-istilah tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut.

a. *Syari'at*

Kata *syari'at* dalam bahasa Arab berarti tempat air minum yang selalu menjadi tempat, baik tujuan manusia maupun binatang. *Syari'at* dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kebutuhan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu *syari'at* dalam arti hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya. *Syaria'at* berarti sumber hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa.²³

b. *Tasyri'*

Dalam bahasa Arab dijumpai kata *syara'a* yang berarti membuat jalan raya, suatu jalan besar yang menjadi jalan utama. Dengan demikian kata *tasyri'* berarti pembuatan jalan raya itu. Oleh karena itu kata *tasyri'* berarti pembentukan hukum Islam secara sistematis, pembentukan hukum-hukum teoritis dan hukum-hukum praktis. *Tasyri'* terbagi dua yaitu *tasyri' samawy* (buatan Allah) dan *tasyri' wad'id* (buatan manusia).²⁴

²³Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Unisba, 1995), h. 10.

²⁴Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h.11.

c. *Fiqh*

Fiqh dalam bahasa Arab berarti pengertian atau pengetahuan. *Fiqh* pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, namun bersamaan dengan perkembangan Islam, kata inipun berkembang hingga digunakan untuk nama-nama sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Dalam peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam, *fiqh* didefinisikan sebagai berikut: Hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan *syari'at* yaitu hukum-hukum yang penggalinya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan ijtihad. Dengan demikian makna *fiqh* telah menjadi suatu nama ilmu yang mempunyai makna tertentu atau istilah khusus dikalangan ahli-ahli hukum Islam.²⁵

Secara terminology, Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁶ Sementara Prof. Dr. Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.²⁷

Dari dua *ta'rif* diatas hukum Islam lebih mencakup pada hukum *syara'* dan hukum *fiqh*, bukan pada *syariat*. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Allah Swt.

²⁵Fazlur Rahman, *Islam*, ed.II (Chicago-London: Chicago University Press, 1979), h.100.

²⁶Samuel Koenig, *Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology* (Cet. I; Net York: Borners Van Noble Inc, 1957), h. 279.

²⁷Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17.

2. Pengertian *Radha'ah*

Radha'ah berasal dari kata (*ra*, *dha* dan *ain*) yang secara leksikal berarti meminum, atau mengisap susu dari buah dada.²⁸ Jadi, secara bahasa *radha'ah* dapat diartikan menyedot puting, baik hewan maupun manusia.

Dari segi istilah, *radha'ah* adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seseorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan merangsang otak seorang anak. Dalam pengertian secara bahasa, tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian secara istilah, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *al-radha'ah* sebagai “sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun atau 24 bulan.”²⁹

Ulama Fiqh mendefinisikan arti anak yang belum mencapai umur dua tahun dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka.³⁰

Dikatakan juga bahwa *radha'ah* secara *syara'* adalah cara pengisapan yang dilakukan ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu.³¹

²⁸Ibrahim Anis, *Kamus al-Wash t* (Mesir: Dar al-Qalam, t.th), 41. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Edisi II (Cet XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 241.

²⁹Abdurahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, th), h. 250-251.

³⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1475.

³¹Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 38.

Radha'ah merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafadz *darbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), yaitu ketika seorang anak kecil mengisap puting susu kemudian meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut dengan *radha'ah*.³²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka ada tiga unsur batasan untuk dapat dikatakan *al-radha'ah asy-syar'iyyah* atau persusuan yang berlandaskan etika Islam, yakni

- a. *Labanu adamiyyatin* (adanya air susu manusia)
- b. *Wushuluhi ila jawfi thiflin* (air susu itu masuk ke dalam perut bayi)
- c. *Duna al-hawlayni* (bayi tersebut belum berusia dua tahun)

Maka dengan itu, rukun *al-radha'ah asy-syar'iyyah* ada tiga unsur:

- a. *Pertama*, anak yang menyusui (*ar-radhi'*),
- b. *Kedua*, perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*), dan
- c. *Ketiga*, kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas minimal.

Suatu kasus (*qadhiyyah*) bias disebut *al-radha'ah asy-syar'iyyah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bias ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *al-radha'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *al-radha'ah asy-syar'iyyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya. Adapun perempuan yang sudah menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma' alayh*) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah monopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua

³²Muhammad Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VII (Beirut: Dar al-Jil, 1995), h. 241.

air susu mereka bisa menyebabkan *al-radha'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman anak yang disusunya.³³

3. Konsep *Radha'ah* Menurut Hukum Islam

a. Dasar Hukum

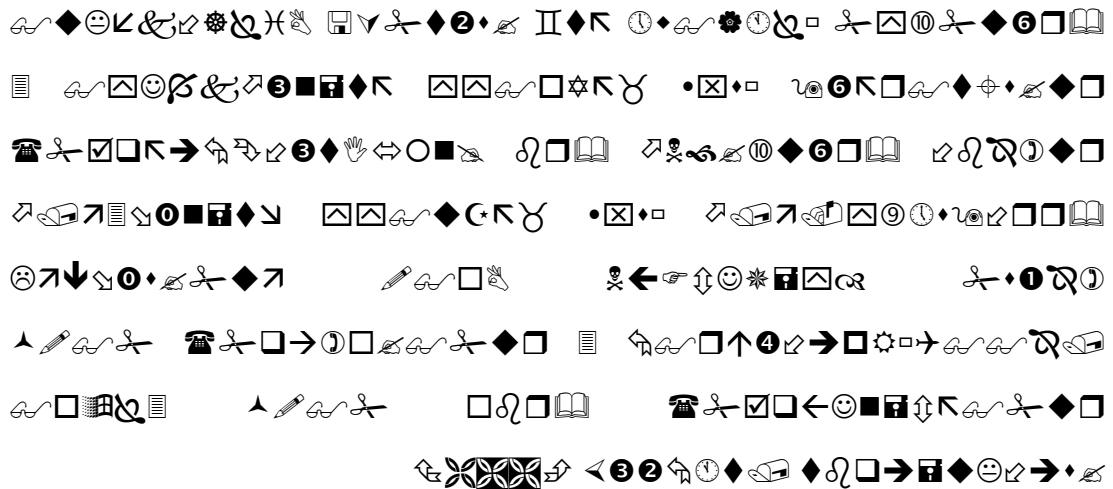
Dasar hukum *radha'ah* banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*al-radha'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat ini, *al-radha'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad saw dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis, keduanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum dan etika "menyusui".³⁴ Enam ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah, ayat 233:



³³Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid*, Juz I [t.tp.: t.p.,t.t], h. 30.

³⁴Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 252-253.



Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena ayahnya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal:

Pertama, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (*walidat*) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak.

Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma’ruf*.

Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri.

Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi’ah*).

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 37.

𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼𐴽

“Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan...”³⁶

QS. Al-Hajj, ayat 2:

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

يَوْمَ تَذُوقُهَا ذُوقَ كُلِّ مُرْضِعَةٍ وَارْتَضِعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۖ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua perempuan yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala perempuan yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.”³⁷

QS. Al-Qashash, ayat 7:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ ۖ فَذَا خَفَتِ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا وَارَدُوهُ إِلَيْنَا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ

Terjemahnya:

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai [Nil]. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah [pula] bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya [salah seorang] dari para rasul.”³⁸

QS. Al-Qashash, ayat 12:

وَوَحَّرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ۖ قَبْلَ فَقَالَ هَٰ أَتَدْرِكُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَّكَفُلُونَهُ ۚ لَكُمْ وَهُمْ لَهُمْ لَصِخُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui[nya] sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”³⁹

Tiga ayat yang terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapa pentingnya ASI (ibu kandung) untuk anaknya, sehingga Nabi Musa kecil dicegah Allah untuk menyusui kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 332.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 386.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 386.

kedahsyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.

QS. Ath-Thalaq, ayat 6:

لَأَسْكُنَهُنَّ فِي حُفِّ سَكَتٍ مِّمَّ وَوَجَدِكُمْ وَوَاضِعَةً لِّتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَنَ كَرَّ أُولَئِكَ حَمَلٍ
فَأَنْظِرُوا عَلَيْهِنَّ ۚ لَا يَضَعُ حَمْلُهُنَّ قَنَ لَأَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَأْتِيَهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَاتَّيَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
نَّ نَ نَعَايَرُكُمْ فَتَرْضَعْنَ لَهُنَّ أُخْرَى ۚ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditolak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁰

Sementara ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak.

Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri *muthallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa ‘iddah.

Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarah secara baik dan adil.

Sementara hadis-hadis tentang *radha’ah* dapat ditemukan melalui kegiatan takhrij hadis,⁴¹ dan dari hasil takhrij tersebut akan diperoleh informasi bahwa hadis-

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 559.

⁴¹*Takhrij al-had* adalah kegiatan pencarian hadis sampai menemukan-nya dalam berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh *mukharrij*-nya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan. Munir. *Pemikiran Hadis-Hadis Radh ‘ah Dalam Kitab Taysir Allam, Subul Al-Salam dan 2002 Mutiara Hadis. Al-Fikr*, Volume 16 No. 1 2002, h. 42.

hadis tentang *radha'ah* termaktub dalam *al-kutub al-tis'ah*.⁴² Hadis-hadis *radha'ah* yang ditemukan dalam berbagai kitab hadis, sebagai berikut:⁴³

1. Dari Ibn 'Abb s ra berkata: bersabda Nabi saw tentang anak perempuan Hamzah. Dia tidak halal bagiku, haram lantaran hubungan sesusuan, apa yang haram karena hubungan keturunan darah. Dia anak perempuan saudaraku sesusuan.
2. Dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran.
3. Aisyah berkata: sesungguhnya Aflah saudara Abi al-Qu'ais meminta izin kepada saya setelah turunnya ayat hijab, maka saya berkata: demi Allah, saya tidak memberi izin kepada kamu sehingga saya meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi saw. karena saudaranya Abi al-Qu'ais bukan orang yang memberi-kan susu kepada saya, tetapi saya disusukan oleh isterinya Abi al-Qu'ais. Kemudian Nabi saw. masuk ke kamar saya, lalu saya berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu bukan orang yang memberikan susu kepada saya, tetapi istri Abi al-Qu'ais yang menyusukan saya. Lalu Nabi saw. berkata: berikanlah izin kepadanya, karena dia itu pamanmu, kamu rugi jika kamu tidak memberi izin.
4. Dari 'Aisyah ra, bahwa Nabi saw masuk kerumahnya, dan di dekat 'Aisyah ada seorang laki-laki dan ketika itu Nabi saw berubah pandangannya seakan-akan dia (Nabi saw) tidak suka tentang hal itu, maka 'Aisyah berkata: Laki-

⁴²Yang dimaksud *al-Kutub al-Tis'ah*, adalah; *Shahih al-Bukh riy*, *Shahih Muslim*, *Sunan Ab D wud*, *Sunan al-Turmuziy*, *Sunan al-Nas 'i*, *Sunan Ibn M jah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Kitab Muwaththa' M lik*. Munir. Pemikiran Hadis-Hadis *Radh 'ah* Dalam Kitab *Taysir Allam*, *Subul Al-Salam* dan 2002 *Mutiara Hadis*, h. 42.

⁴³Munir. Pemikiran Hadis-Hadis *Radh 'ah* Dalam Kitab *Taysir Allam*, *Subul Al-Salam* dan 2002 *Mutiara Hadis*. Volume 16, NO. 1, 2002, h. 47.

laki itu adalah saudaraku. Lalu Nabi saw bersabda perhatikanlah saudaramu, karena sesungguhnya penyusuan itu disebabkan kelaparan.

5. Dari Aisyah ra ia berkata: Rasulullah bersabda: tidak bisa diharamkan sekali isap dan dua kali isap.
6. Darinya (yakni Aisyah) berkata: telah datang Sahlah binti Suhail, lalu berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya Salim Maula bagi Abi Huzaifah beserta kami di rumah kami, padahal ia telah sampai kepada umur laki-laki, maka sabdanya: susuilah akan dia, niscaya engkau jadi haram kepadanya.

Secara umum, hadis-hadis yang telah dikutip mengandung makna bahwa dampak dari penyusuan adalah ke-*mahram*-an. Kemudian khusus hadis ke-lima dari syarah al-Shan' ni mengandung makna bahwa sekali isap dalam menyusui tidak menyebabkan ke-*mahram*-an.⁴⁴

b. Rukun dan Ketetapan *Radha'ah*

Jumhur Ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun *radha'ah* ada tiga,⁴⁵ yaitu;

- 1) Wanita yang menyusui;

Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun, ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal.⁴⁶

⁴⁴Munir. Pemikiran Hadis-Hadis *Radha'ah* Dalam Kitab *Taysir Allam, Subul Al-Salam* dan *2002 Mutiara Hadis*, h. 48.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut; Dar al-Fikr al-Ma'sir, 1998), h. 7273.

⁴⁶Ibnu Rusyd, Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid*, h. 191.

Menurut Syafi'i, air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati.⁴⁷

- 2) Air Susu;
- 3) Anak yang Menyusui.

Untuk menghindari kesimpang-siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain daripada ibunya tersebut, para ulama fiqih menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut, diantaranya sebagai berikut:

a) *Ikrar*

Menurut Mazhab Hanafiyah, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersamaan atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan, maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim memaksa mereka untuk berpisah.

Menurut Malikiyyah, *radha'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.⁴⁸

b) *Persaksian*

⁴⁷Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 221-223.

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, h. 7290-7292.

Persaksian, yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqih yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

Menurut ulama Mazhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena ‘Umar bin al-Khattab mengatakan, *“Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki.”* Para sahabat lain tidak membantah ketetapan ‘Umar bin al-Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma’ para sahabat, dan ijma’ para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah swt dalam Surah al-Baqarah, ayat 282 yaitu:

وَأَسْنِهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ

Terjemahnya:

“Dan persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”⁴⁹

Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita belum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad.

Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 48.

diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian.

Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadis tersebut bersifat sunnah.⁵⁰

B. Pandangan Ulama Empat Mazhab terhadap Kadar Sesusuan yang mengharamkan Pernikahan

1. Biografi Ulama Empat Mazhab

Pengertian Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha' (*mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *mujtahidin* untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Objek bahasan Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.⁵¹

Berikut Empat Imam Mazhab yang memiliki peranan dalam penetapan hukum Islam, yaitu:

a. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah imam madzhab yang pertama, nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al- Nu'man bin Tsabit ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir dikufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Ia menjalani hidup di dua

⁵⁰Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, h. 7293-7294.

⁵¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

lingkungan sosio-politik, yakni di masa bani Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Abu Hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi yang dikenal dengan “al- imam al- azham” yang artinya imam terbesar. Abu hanifah dikenal sebagai ulama ahl al- ra’yi. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur’an ataupun hadis, beliau lebih banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra’yi dari khabar ahad.⁵² Beliau sendiri tidak mengarang kitab, tetapi muridnyalah yang menyebarkan pahamnya, kemudian dalam kitab-kitab mereka. Mazhab ini berkembang di Turki, Afganistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin dan Mesir.⁵³

Menurut Jaih Mubarak Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak, membagi cara ijthad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijthad yang pokok dan cara ijthad yang merupakan tambahan. Cara ijthadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

إِذْ أَخَذْنَا بِكَ الْوَعْدَ إِذَا وَجَدْنَاهُ، فَمَا لَأَخَذَ فِيهِ لُحْدًا، بِسْمِ رَسُولِ اللَّهِ، صَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا تَأْخُذْ، لَأَلَمْ أَجْزِئْ بِابْنِهِ وَلَا بِرَقَرٍ لِي إِلَيْهِ عَدُوٌّ وَسَلَّ الْأَخْتُ، يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ

⁵²H.M.Asywadie Syukur,Lc, *Perbandingan Madzhab* (Cet. II; Surabaya: Bima Ilmu, 1982), h. 95-98.

⁵³H.M.Asywadie Syukur,Lc, *Perbandingan Madzhab.*, h. 76.

مَنْ شَيْئٌ وَأَدْعَ مَنْ شَيْئٌ، لَا أُخْرِجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا انْتَهَى لِأَمْرٍ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
الشَّعْبِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى أَنَّ أَجْتَنَّهُدُوا...

Artinya:

“Saya berpegang kepada Kitab Allah (al-Qur'an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada Sunnah dan Atsar. Jika saya tidak temukan dalam Kitab dan Sunnah, saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada yang lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Said ibn al-Musayyab, maka saya harus berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.”⁵⁴

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, menerangkan mengenai dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakkan fikih sebagai berikut: Abu Hanifah berpegang kepada riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta urf mereka itu beliau memegangi Qiyas, kalau tidak baik dalam satu-satu masalah di dasarkan kepada Qiyas, beliau memegangi istishsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan 'urf. Ringkasannya dasar Istinbat hukum Abu Hanifah adalah:

- 1) Al Kitabullah.
- 2) Sunnah Rasulullah dan atshar-atshar yang shahih yang telah masyhur diantara para ulama.
- 3) Fatwa-fatwa para sahabat.
- 4) Qiyas.
- 5) Istihsan.

⁵⁴Jaih Mubarak, Pengantar, Juhaya S. Praja, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 74-75.

6) Adat dan ‘urf masyarakat.⁵⁵

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Abu Hanifah dalam melakukan istinbath hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti apa yang ia ucapkan itu tersebut. Dari sistematis atau tertib urutan sumber dalil di atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Kitab atau al-Qur'an pada urutan pertama, kemudian al-Sunnah pada urutan kedua dan seterusnya secara berurutan Qaul Shahabi, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan dan yang terakhir adalah al-'Urf. Dalam hal terjadinya pertentangan Qiyas dengan Istihsan, sementara Qiyas tidak dapat dilakukan, maka Abu Hanifah meninggalkan Qiyas dan berpegang kepada Istihsan karena adanya pertimbangan maslahat. Dengan kata lain penggunaan Qiyas sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika Qiyas tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan Istihsan dengan alasan maslahat.⁵⁶

b. Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/ 12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah.

⁵⁵Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi I (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 86-87.

⁵⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.98.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Ketekunan dan kecerdasannya Imam Malik tumbuh sebagai ulama terkemuka terutama dalam bidang ilmu hadis, terutama bidang hadits di Madinah.⁵⁷ Mazhab ini dibangun oleh Imam Malik bin Anas. Ia cenderung kepada ucapan perbuatan (praktek) Nabi saw. Praktek para sahabatnya serta ulama Madinah. Mazhab ini berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahraen. Adapun metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

1) Al-Kitab (al-Qur'an)

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-Mukhalafah* dan mafhum *al-Aula* dengan memperhatikan 'illatnya.

2) Al-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *al-Mutawatir* atau *al-Masyhurah*).

⁵⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 102.

3) Al-Ijma' Ahl al-Madinah

Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma' ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah saw, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik.⁵⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, yang dimaksud dengan ijma' ahl al-Madinah tersebut ialah *ijma' ahl al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi saw. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan *hujjah*. *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari al-Naql, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai *hujjah*.

Dikalangan mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.

4) Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan Sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Namun demikian, beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada Qiyas.

⁵⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 105-106.

5) Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui *khavar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khavar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qath'iy*. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas dari pada khabar ahad. Kalau *khavar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khavar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.

6) Al-Istihsan

Menurut mazhab Maliki, al-Istihsan adalah: "Menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan". Dari ta'rif tersebut, jelas bahwa istihsan lebih mementingkan masalah juz'iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu,

maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madharat.

7) Al-Maslahah al-Mursalah

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka masalah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, sunnah atau ijma'.⁵⁹

c. Imam Syafi'i

Imam syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan rajab tahun 150 H. (767 M.). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanafiyah. Imam syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M.). Nama lengkap Imam syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad Idris ibn Abbas ibn syafi'i ibn saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd Al-Manaf ibn Qushay AL-quraisiy.

Adapun aliran keagamaan Imam syafi'i, sama dengan imam mazhab lainnya dari imam-imam mazhab keempat: Abu hanafiyah, malik bin anas dan ahmad ibn hanbal adalah termasuk golongan ahli sunnah waljama'ah. Dalam bidang furu' dan terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran ahlu al- hadits dan aliran ahlu al- Ra'yi. Imam syafi'i sebagai imam rihalah fi thalab al-figh.⁶⁰ Beliau adalah murid Imam Malik

⁵⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 102.

⁶⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 120-123.

yang pandai. Mazhab Syafi'i berkembang di Mesir, Sirian, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangtai, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.⁶¹

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, al-Risalah, sebagai berikut:

لَيْسَ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَالًا أَوْ حَرَمًا إِلَّا الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ

Artinya:

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.”⁶²

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak sebagai berikut:

لَا أَصْلَ قَوْلٍ وَاسْتَدْلٍ لَهُ بِكُنْ قِيَاسٍ عَلَيْهِمَا. ذَا مَا اتَّصَدَّ الْحَدِيثُ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَصَحِّهِ لِلْإِسْنَادِ فَهُوَ الْمُتَّبَعُ. وَإِلَّا جَمَعَ الْأَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُقَرَّدِ وَالْحَدِيثِ، عِلْمًا ظَاهِرًا وَذَا الْخُتْمِ الْمَعَانِي لِمَا أَتَتْ بِهَا لَاهِلُهَا وَلَا نَا. وَذَا مَا اتَّصَدَّ لَهَا حَدِيثُهَا، وَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا لَوْلَا هَا، وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ إِلَّا عَا مِّنْقَطِعِ الْبَرِّ الْمُسَيَّبِ وَلَا يَسْ لَمْ أَصَدُّ وَوَأَقْلُ لَأَصْلُهَا وَكَيْفَ. وَإِنَّمَا يُقَالُ بِالْقُرْآنِ عِلْمًا. إِذَا أَصَابَ وَفَقَّ مَثَبُهَا حُجَّةً

Artinya:

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah saw dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahir-lah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadis Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada

⁶¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 77.

⁶²Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Pengantar, Nurcholis Madjid, Penerjemah, Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 23.

cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”⁶³

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:

1) Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Al-Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an. Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:⁶⁴

- a) Perawinya terpercaya
- b) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c) Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- d) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

2) Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah *hujjah* dan ia menempatkan ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma'

⁶³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qawal qadim dan qawi jadid*, Cet. I (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2002), h.31-32.

⁶⁴Huzaemah Tahido Yanggo *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h .128.

kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak ijma' sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

3) Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dan dalil keempat⁶⁵ setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum.

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah, dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.⁶⁶

d. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Bagdad pada bulan Robiul Awal tahun 164 H./ 780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya Di Kota Marwin, wilayah Khurasan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana imam Ahmad Hanbal dilahirkannya. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al- Syaibaniy. Ibunya bernama Syarifah Maimunnah binti Abd al-Malik ibn sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Baik dari

⁶⁵Huzaemah Tahido Yanggo *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.129-131.

⁶⁶Huzaemah Tahido Yanggo *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 142-144.

pihak ayah, maupun pihak ibu, Imam Ahmad Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili disemenanjung Arabia.⁶⁷ Mazhab Imam ibn Hanbal lebih banyak menitikberatkan kepada hadis dalam berijtihad dan tidak menggunakan ra'yu dalam berijtihad kecuali dalam darurat, yaitu ketika tidak ditemukan di hadis, walaupun hadis dha'if yang tidak terlalu dha'if, hadis dha'if yang diriwayatkan oleh pembohong. Mazhab ini berkembang di Saudi Arabia, Sirian dan di beberapa negeri di bagian Afrika.⁶⁸

Adapun metode istidlal Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

- 1) Nas dari al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih

Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari al-Qur'an dan dari sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

- 2) Fatwa para sahabat Nabi saw

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari hadis shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka.

Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Apabila imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.

- 3) Hadis mursalah dan hadis dha'if

⁶⁷Huzaemah Tahido Yanggo *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 137.

⁶⁸Huzaemah Tahido Yanggo *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 77.

Apabila imam Ahmad tidak mendapat dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau hadis mursal dan hadis dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal dibagi dalam dua kelompok: hadis shahihah dan hadis dha'if.

4) Qiyas

Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapat nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits dha'if dan mursal, maka Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan pada saat keadaan darurat.

- 5) Langkah terakhir adalah menggunakan sadd al-dzara'i, yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif.⁶⁹

2. Pandangan Ulama Empat Mazhab tentang Kadar Sesusuan yang mengharamkan Pernikahan

Menurut jumhur ulama, syarat susuan yang mengharamkan nikah ada enam syarat, yaitu:⁷⁰

- a. Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
- b. Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari putting susu maupun melalui alat penampungan susu seperti gelas, botol dan lain-lain.

⁶⁹Djamil Fathhurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 110-119.

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, h. 7283.

Menurut ulama Empat Mazhab, terjadinya *radha'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada isapan air susu kelambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI. Menurut Imam Malik dan Hanafi harus melewati rongga mulut, sedangkan menurut Hanbali adalah sampai lambung dan pada perut atau otak besar.

- c. Menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut (*wajur*) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung (*sa'ut*) karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, namun memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram.

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram.

Begitu juga menurut Imam Muhammad, penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum kemahraman seperti batalnya puasa karena persusuan.⁷¹

- d. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu, maka mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain, maka tidak mengharamkan nikah.

⁷¹Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995) h. 436, Burhanuddin, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 235.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, termasuk apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.⁷²

Akan tetapi, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qaisy al-Kufi, seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis.⁷³

e. Menurut Empat Mazhab Fiqih dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusui. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusui itu adalah anak yang sudah dewasa diatas dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun.⁷⁴

Maksudnya, selambat-lambatnya waktu menyapih adalah setelah anak berumur dua tahun.

Dan sebuah riwayat hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا كَانَ فِي حَوْ لَيْنِ (رواه مسلم)

Artinya:

⁷²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, h. 7284-7285.

⁷³Ibnu Hamman, *Syarh Fath al-Qadir*, h. 435.

⁷⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopodi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1474.

“Dari Ibn ‘Abbas dari Rasulullah Saw, “tidak dinamakan menyusui kecuali dalam usia dua tahun.”⁷⁵

Akan tetapi, Daud az-Zahiri mengatakan bahwa susuan anak yang telah dewasa tetap mengharamkan nikah. Alasannya adalah sebuah riwayat dari Aisyah:

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْ خُلُّ عَلَيْكَ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أَحَبُّ أَنْ يَدْ خُلَّ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَّا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ إِمْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَلِمًا يَدْ خُلَّ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِي أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْ خُلَّ عَلَيْكَ" (رواه مسلم)

Artinya:

“Umami Salamah berkata pada Aisyah bahwa anak kecil yang masuk dalam rumahmu yang tidak saya sukai ketika masukku berkata: “mungkin engkau mendapat jawaban pada Rasulullah saw tentang masalahmu? Berkata: sesungguhnya Istri Abi Huzayfah (Sahlah binti Suhail) berkata “Ya Rasulullah, Salim masuk dalam rumahku dan dia adalah seorang laki-laki. Dan dalam diri Abi Huzayfah darinya terdapat sesuatu. Rasulullah menjawab, “susukan dia, sehingga ia dapat masuk dalam rumahmu.”⁷⁶

Menurut jumhur ulama, *radha'ah* hanya dapat terjadi dalam masa anak-anak.

Jumhur ulama menyatakan bahwa kasus Salim merupakan *nukhsah* (keringanan hukum) baginya.⁷⁷

- f. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanabali, penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan menurut ada istiadatnya (*urf*), ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah enggan menyusu, maka dihitung menjadi *radha'ah* hal itu didasarkan pada *urf*. Adapun ketika bayi memutuskan berpisah dari menyusu

⁷⁵Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, *Kitab as-Sunan as-Saghir*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 138, al-Hafiz 'Ali Ibn 'Umar ad-Daruqutniy, *Sunan ad-Daruqutni*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, th), h. 103.

⁷⁶Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim*, Juz II, KH. Abid Bisri Musthofa (Semarang: As-Syifa', 1993), h. 29.

⁷⁷Muhammad Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, h. 241.

walau hanya sekedar istirahat, berhafas, bermain-main atau berpindah-pindah pada puting satu ke yang satunya dari satu wanita ke wanita yang lain, kemudian dia kembali menyusui lagi maka tidak masuk dalam hitungan *radha'ah*, melainkan seluruhnya dihitung satu kali isapan saja. Apabila penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan, maka tidak ada hukum mahram. Apabila ada keraguan (*syak*) dalam hitungannya, maka harus dibangun adanya keyakinan dalam persusuan tersebut karena hal itu pada asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena *syak* merupakan hal yang samar. Hal ini didasarkan pada tiga dalil, yaitu:

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرَمُ مِنْ ثُمَّ نَسَخْنَاهُ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Dari Aisyah ra, Sesungguhnya dia berkata: “Ayat al-Qur’an pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusui jika susuan (mencapai) sepuluh kali susuan, kemudian dinaskh menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah wafat dan hukum lima kali susuan itu masih dibaca dalam al-Qur’an”⁷⁸

Hadis tersebut menjelaskan tentang susuan yang *dinasakh* dari sepuluh kali susuan menjadi lima kali susuan, dan hukum lima kali susuan ini berlaku semenjak wafatnya Rasulullah sampai sekarang.

Illat yang terkandung dalam kemahraman adalah *syubhat juz’iyyah*, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak

⁷⁸Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim*, h. 25.

mengharamkan, yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadis, yaitu lima kali susuan.

Hadis lain dari ‘Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَالَ سُؤْدَةُ وَزُهَيْرُ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصْتَانِ

Artinya:

“Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw bersabda dan Suwaid dan Zuhair: Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah menimbulkan kemahraman satu kali sedot dan dua kali sedotan.”⁷⁹

Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi ASI yang banyak atau sedikit tetap dihukumi mahram meskipun satu kali isapan. Berdasarkan pada tiga dalil dibawah ini:⁸⁰

1. *Keummumah* firman Allah swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ أُمَّهَاتُكَ وَوَبَنَاتُكَ وَأَخَوَاتُكَ وَعُمَّاتُكَ وَخَالَاتُكَ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكَ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّا تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلكُمْ أَبْنَاءُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنََابِكُمْ وَلَئِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَهًا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ أَنْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٣

terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

⁷⁹Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim*, h. 25.

⁸⁰Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, h. 7279.

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁸¹

Firman ini menjelaskan bahwa, jika seorang anak laki-laki maupun perempuan yang menyusui pada ibu susuan yang sama, maka laki-laki dan perempuan tersebut otomatis akan menjadi saudara karena sepersusuan. Bagaimanapun cara dan banyaknya terjadi persusuan tersebut tetap menimbulkan hukum mahram.

2. Hadis Bukhari, Muslim, Ibnu ‘Abbas, dan ‘Aisyah yang menyatakan bahwa,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

Artinya:

“sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab.”

Hadis tersebut mengandung hukum mahram tanpa menentukan persusuan dan didukung pula dengan hadis lain dari para sahabat, yaitu riwayat dari ‘Ali, Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas. Mereka berkata,

3. Bahwa persusuan merupakan perbuatan yang mengandung hukum mahram, maka baik sedikit atau banyak sama saja karena maksud dari asy-Syari’ adalah menggantung hukum dan hakikat secara terlepas dari syarat berulang-ulang dan banyaknya. Apabila hakikat itu terwujud, maka hukum itupun datang.

Pendapat ini banyak dipakai di Negara Mesir dan Libya, sedangkan pendapat pertama banyak dipakai di Negara Suriah karena merupakan pendapat yang kuat dan mengandung unsur kemudahan dan keluasaan bagi manusia.⁸²

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 81.

⁸²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu*, h. 7189-7190.

Sedangkan menurut Daud Az-Zahiri, kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isapan dan jika kurang dari itu, tidak haram bagi lelaki tempat ia menyusui.

Menurut Daud Az-Zahari, hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh ayat al-Qur'an di atas dibatasi oleh hadis ini. Dengan demikian, ibu susuan dan seluruh wanita yang mempunyai hubungan darah dengannya haram dikawini apabila susuan itu mencapai kadar tiga kali susuan atau isapan tiga kali ke atas.⁸³ Begitu juga menurut Saur Abu Daud dan Daud Ibnu Muzakkir, yaitu sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.⁸⁴

⁸³Ibnu Qayyim, *Jami' al-Fiqh*, Juz VI (Kuwait: Dar al-Wafa', 2005), h. 193-194.

⁸⁴Ibnu Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, Juz V (Kuwait: al-Mannar al-Islamiyyah, 1992), h. 571.

BAB III

OPERASIONAL BANK ASI DAN STATUS KEMAHRAMAN PENERIMA DAN PENDONOR BANK ASI

A. *Bank ASI*

1. Sejarah Bank ASI

Ide-ide Bank ASI muncul di Eropa semenjak kurang lebih 50 tahun yang lalu setelah muncul bank darah, yang mana bank tersebut mengumpulkan susu para ibu dengan cara membelinya, kemudian menyimpannya dan menjualnya, ataupun mengeringkan dan mengalengkannya sehingga bisa dijual kepada para konsumen yang memerlukannya. Sebagai ganti untuk si bayi yang menyusui dari susu ibunya atau para *baby sister*. Sejak saat itu, berpindahlah ide-ide semacam ini ke negara-negara Islam dan bahkan sebagian orang Islam menyeru kepada hal tersebut sebagai suatu taklid terhadap apa yang terjadi di Eropa.⁸⁵

Istilah Bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.⁸⁶

Bank ASI mengalami perkembangan di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada pertengahan 1985 dengan berdirinya *The Human Milk Banking Association of North America (HMBANA)*. Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan,

⁸⁵Lajnah Min Asatizhi Qismi al-Fiqh al-Maqarin, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'asharah*, Juz I (tp, 2006), h. 233.

⁸⁶FDA Working Group. "Backgrounder on Banked Human Milk." Dalam www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM235642.pdf diunduh tanggal 22 Juli 2014.

dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada and Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyediaan layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga, dan mendukung donor Bank ASI dan menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.⁸⁷

Praktek bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Bank ASI yang awalnya muncul di Wina, Austria pada tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah berkembang di berbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bahwa bank ASI berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI. Perkembangan bank ASI tersebut juga merambah ke negara-negara berpenduduk muslim, meskipun praktek pemberian susu oleh perempuan bukan ibu telah berjalan sejak lama di beberapa negara, termasuk di Kuwait. Namun pelaksanaan bank ASI di negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian ASI terhadap hubungan antara pemberi dan penerima ASI dan istilah bank yang digunakan untuk menyebut institusi yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI tersebut.⁸⁸

Di Indonesia sendiri, donor ASI mulai familiar terdengar pada awal tahun 2008, namun sebenarnya donor ASI sudah mulai dikenal tahun 2007. Belum diketahui ada tidaknya Bank ASI di Indonesia yang bisa memberikan donor. Untuk itu, donor ASI di Indonesia memerlukan proses yang cukup rumit karena disebabkan

⁸⁷Jan Kennaugh MD1 and Laraine Lockhart-Borman, "The Increasing Importance of Human Milk Banks." *E-Journal of Neonatology Research*. Sebagaimana dimuat dalam <http://www.neonatologyresearch.com/wp-content/uploads/2011/09/Human-Milk-Banking2.pdf>. diunduh tanggal 22 Juli 2014, h. 120.

⁸⁸Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans. "Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting." *Eastern Journal of Medicine* 15 (2010), h. 163-167.

dengan banyak faktor, seperti keluarga, tradisi, juga agama. Banyak proses yang harus dilalui jika akan memperoleh donor ASI maupun akan mendonorkan ASI-nya.

Pada tahun 2007, timbullah suatu inisiatif dari Mia Sutanto, salah seorang warga Negara Indonesia yang peduli akan pentingnya ASI Eksklusif yang diberikan kepada para bayi. Dia mendirikan sebuah lembaga yang hampir sama dengan Bank ASI, tetapi lembaga itu sendiri tidak berfungsi sebagai bank ASI, lembaga ini berfungsi sebagai “Mak Comblang” saja, atau yang menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI donor ASI. Lembaga yang diketuai oleh Mia Sutanto ini didirikan 21 April 2007 memulai kiprahnya dari milis “*ASI For Baby*”. Milis ini ditujukan kepada para calon ibu dan ayah yang peduli dan pemerhati ASI, sehingga antara pendonor ASI dan penerima donor ASI masih terdapat unsur kekeluargaan, saling kenal, dan saling percaya. Kendati demikian, AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) tetap memberikan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI.⁸⁹

2. Prosedur Pendonoran dan Pengambilan Susu di Bank ASI

Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HMBANA kemudian membuat prosedur penanganan donor ASI. Prosedur yang dibuat oleh HMBANA antara lain untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ke tangan yang membutuhkan. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Identifikasi dan *screening* donor, termasuk sejarah rinci penyakit dan tes darah.

⁸⁹Mia Sutanto, *Aimi mak comblang asi eksklusif*, di akses pada tanggal 22 juli 2014 dari <http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-eksklusif>.

- b. Susu hibah dikirimkan kepada bank ASI dalam kondisi membeku.
- c. Susu kemudian dicairkan dan dicampurkan dengan susu dari donor lainnya.
- d. Susu disterilkan pada suhu 62,5° celcius selama 30 menit.
- e. Bakteri yang bermanfaat dibiakkan untuk menjamin hasil strelisasi.
- f. Analisis kandungan susu, seperti lemak, karbohidrat, dan laktosa.
- g. Susu yang steril dibekukan pada suhu 20° celcius.
- h. Susu disalurkan dengan resep dokter. Biaya yang dikenakan sesuai dengan biaya proses dan pengiriman. Pendonor tidak memperoleh ganti uang.⁹⁰

Praktek screening dan tes darah rutin bagi pedonor juga dipraktekkan di Norwegia. Pedonor setiap tiga bulan dites dari kemungkinan terjangkit virus HIV, Hepatitis B dan C, CMV, dan virus leukimia (HTLV) 1 dan 2. Bank ASI harus memiliki sistem untuk melacak arus donor susu dari pedonor kepada penerima, namun Bank ASI merahasiakan identitas pedonor dan penerima.⁹¹

Tentunya dengan prosedur seperti diatas, Bank ASI akan mendapat hambatan. Untuk mengatasinya, diperlukan beberapa tindakan dalam prosedur pendonoran dan pengambilan susu di Bank ASI untuk Negara-negara muslim:⁹²

1. Sebaiknya hanya satu donor untuk satu anak.
2. Seharusnya tidak ada pencampuran susu pendonor.
3. Semua susu donor harus diberi label yang memungkinkan teridentifikasinya pendonor.

⁹⁰Jan Kennaugh MD1 and Laraine Lockhart-Borman, "The Increasing Importance of Human Milk Banks."

⁹¹Anne Hagen Grøvslien and Morten Grønn."Donor Milk Banking and Breastfeeding in Norway." *Journal of Human Lactation*. J. Hum Lact. 25(2), 2009. h. 208. Sebagaimana diunduh dari http://www.eatsonfeets.org/docs/Donor_Milk_Banking_and_Breastfeeding_in_Norway.pdf pada tanggal 22 Juli 2014.

⁹²Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans."Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting."h. 166.

4. Adanya pengungkapan identitas pendonor kepada pihak penerima dan keluarganya. Kedua pihak harus menyetujui pengungkapan tersebut.
5. Nama, alamat, nomor kartu identitas pendonor sebaiknya dimasukkan pada akte kelahiran anak penerima donor.
6. Di bentuknya program yang menguntungkan bayi premature, dimana setiap ibu harus dibuat agar bertanggung jawab untuk dapat memproduksi susu mereka sendiri sesegera mungkin agar jumlah pendonor dapat dibatasi.
7. Penerima donor ASI hanya untuk anak yang ibunya mengalami kontraindikasi medis untuk menyusui atau anak dengan ibu yang meninggal.
8. Jika beberapa ibu pendonor hanya memiliki anak-anak dari satu jenis kelamin, maka susu bisa disediakan untuk pihak penerima dari jenis kelamin yang sama.

B. Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI

1. Pengertian Kemahraman

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia, diartikan sebagai orang-orang yang haram melakukan pernikahan, dalam fiqih dibagi menjadi dua, yakni; *mahram mua'bbad* dan *ghairu mu'abbad*.

a. Mahram Mu'abbad

Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.⁹³ Ada tiga kelompok *mahram mu'abbad* menurut fiqih, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan perkawinan dan hubungan persusuan.⁹⁴

⁹³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana), h. 110.

⁹⁴Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fatkhul Mu'in Bisyarhil Qur'atal 'Ain*, Dar Ihya'i al- Kutub al-'Arabiyah, (Indonesia, tt), h. 100-101.

b. Haram karena hubungan nasab/kekerabatan

Berikut ini orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang lakilaki karena ada hubungan kekerabatan:

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Saudara perempuan ibu
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan

Mengenai keharaman pernikahan karena ada hubungan nasab semua ulama mazhab sepakat.⁹⁵ Haramnya perempuan-perempuan yang disebut diatas untuk dinikahi oleh seorang laki-laki ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكَ أُمَّهُنَّ وَأَبْنَاؤُكَ وَأُخْوَاتُكَ وَعُمَّاتُكَ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكَ وَالْأَخَوَاتُ الَّتِي أَرْضَعْنَهُنَّ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي فِي حُجْرَتِكُ مِمَّنْ يَسَابِقُكَ الَّتِي دَخَلْتَ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكَ الَّتِي فِي أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾

Terjemahnya:

“Diharamkan atasmu ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara-saudara perempuanmu”⁹⁶

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa penyebutan perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam bentuk jama' sehingga diambil pengertian dengan mengembangkan secara vertikal dan horizontal.⁹⁷

⁹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 61.

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

Berikut ini perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena hubungan kekerabatan selengkapanya.

1. Ibu, ibunya Ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
 2. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
 3. Saudara, baik kandung, seayah maupun seibu
 4. Saudara perempuan ayah, baik yang hubungannya dengan ayah sekandung, seibu, atau seayah; saudara kakek sekandung, seayah maupun seibu terus dalam garis lurus ke atas
 5. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya dengan ibu sekandung, seibu maupun seayah; saudara nenek sekandung, seibu maupun seayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
 6. Anak dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
 7. Anak dari saudara perempuan, kandung, seibu maupun seayah; cucu saudara kandung, seibu maupun seayah dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Haram karena hubungan perkawinan

Perempuan-perempuan yang haram bagi laki-laki untuk selamanya karena ada perkawinan antara lain adalah:

1. Ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah
2. Menantu
3. Mertua

⁹⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 112.

4. Anak dari istri yang telah digauli

Dasar hukum tentang keharaman diatas adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

وَأَنْ تَنْكِحُوا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu...”⁹⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ أُمَّهَاتُكَ وَوَبَنَاتُكَ وَأِخْوَانُكَ وَعَمَّاتُكَ وَخَالَاتُكَ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَوَبَنَاتُ الْأَخِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ۚ لَهُنَّ نِسَابٌ كَمَنْ رَبَّيْنَكُمْ فِي حُبُورِكُمْ
مِنْ نِسَابِكُمْ ۚ الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِمْ قَدْ تَبَيَّنَ ۚ فَمَا جُنَاحُ عَلَيْكُمْ خَلْقَ الْبَنَاتِ مِنْ بَنَاتِكُمْ
الَّتِينَ مِنْ أَصَابِكُمْ وَلَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ ۚ إِنَّ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“...dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istrimu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa-apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri dari anak-anakmu...”⁹⁹

Mazhab Syi'ah dan empat ulama mazhab Sunni; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita di atas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.¹⁰⁰

d. Haram karena hubungan sesusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu sendiri dapat menyusui karena kehamilan dari hubungannya dengan suaminya, maka anak yang menyusu kepadanya juga terhubung dengan suaminya layaknya seorang anak terhubung kepada ayah

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

¹⁰⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah, (Jakarta:Kencana, 2001), h. 326-328.

kandungnya.Selanjutnya keharaman-keharaman melakukan perkawinan berlaku sebagaimana hubungan nasab.¹⁰¹

Dasar dari keharaman menikahi saudara sesusuan adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتَكُمْ وَوَبَنَاتَكُمْ وَأَخَوَاتَكُمْ وَعُمَّاتَكُمْ وَخَالَاتَكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ۚ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَنَازِعُوهُنَّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحُنَّ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَن تَبْتَغُوا
الْبَنِينَ مِنْ أَصْدَابِكُمْ وَلَئِنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:
 “...dan ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan dari susuanmu...”¹⁰²

Semua ulama sepakat mengenai keharaman menikahi seseorang yang memiliki hubungan sesusuan, tetapi berbeda pendapat dalam menentukan terjadinya hubungan sesusuan.

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa air susu yang diberikan harus berasal dari wanita yang hamil dari perkawinan sah, sedangkan Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa air susu itu boleh berasal dari gadis atau janda, menikah atau belum.¹⁰³

Jumhur ulama berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi jika bayi yang menyusu berumur tidak lebih dari dua tahun, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam al-Muwata'.¹⁰⁴

حَدَّثَنِي عَنْ مَا لَكَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كَانَ فِي الْحَوْ
لَيْنَ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ

¹⁰¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, h. 115-116. Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 61.

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

¹⁰³Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 340-341.

¹⁰⁴Imam Malik bin Anas, *Kitab Al-Muwatta'*, (Beirut:Dar al-fikr, 1989), h. 387, hadis no.

Artinya:

“Ya menceritakan kepadaku dari Malik, dari Tsaur bin Zaid ad-Dili, dari Abdullah bin Abbas, penyusuan anak yang masih dibawah umur dua tahun adalah mengharamkan walaupun hanya satu isapan” (H.R.Malik bin Anas).¹⁰⁵

Dalam hal kadar susuan Imam Malik berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi tanpa melihat berapa banyak si bayi menyusu, asal jelas sudah menyusu maka timbullah hubungan susuan. Jumhur ‘Ulama’ berpendapat bahwa hubungan susuan terjadi jika si bayi menyusu paling sedikit lima susuan, berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah berikut ini:¹⁰⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرٌ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ مِنْ ثُمَّ نَسَخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ أَنْ

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata: aku mendapatkan dari Malik, dari Ubaidillah bin Abi Bakar, dari ‘Amrah, dari Aisyah, sesungguhnya ia berkata : pada waktu turunnya al-Qur’an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian di nasakhkan dengan lima kali, kemudian Nabi SAW wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam al-Qur’an” (H.R.Muslim)¹⁰⁷

Berkaitan dengan kemurnian air susu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa susu yang telah bercampur dengan zat lain tidak dapat menimbulkan hubungan susuan. Imam Syafi’i dan sebagian pengikut madzhab malik berpendapat bahwa hubungan susuan tetap terjadi meski susu tidak murni selama tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁵Imam Malik bin Anas, *Al-Muwata’ Imam Malik*, terj. *Al-muwata’ lil Imam Malik*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), h. 857, hadis no. 1259.

¹⁰⁶Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj, *Terjemah Shahih Muslim*, h.167.

¹⁰⁷KH. Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim*, terj. *Shahih Muslim*, (Semarang:CV. Asy-Syifa, 1993), h. 843, hadis no. 24.

¹⁰⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, h. 118-119. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 343.

1) *Mahram Ghairu Mu'abbad*

Mahram ghairu mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi.¹⁰⁹

Beberapa sebab yang menimbulkan hubungan *mahram ghairu mu'abbad* antara lain adalah:

a) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Mengumpulkan dua orang bersaudara yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus dalam satu masa. Larangan tersebut melahirkan ketentuan sebagai berikut:

Jika keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan maka pernikahan pertama sah sedangkan yang kedua batal.¹¹⁰

Bersaudara yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an Nisa' ayat 23 diatas adalah seorang wanita dengan saudara kandungnya, dengan bibi dari ayah atau ibunya, dengan anak dari saudara perempuan atau laki-lakinya.¹¹¹ Akan tetapi mengenai dua orang yang berhubungan sebagai bibi dan keponakan para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya haram mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya maupun dari ibunya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menegaskan keharaman mengumpulkan istri dengan bibinya.

¹⁰⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 124.

¹¹⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 124-125.

¹¹¹Sayid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 131-132.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Maslamah al-Qa’naby, menceritakan kepadaku Malik dari Abi az-Zinadi dari al-A’raj, dari Abi Hurairah ia berkata: asulullah bersabda: dilarang mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayah dan bibi dari ibunya”(H.R.Muslim)¹¹²

Ulama Syi’ah menetapkan hukum makruh mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, dan demi kebaikan bersama ditentukan bahwa jika yang dinikahi pertama adalah kemenakan maka tidak perlu izin untuk menikahi bibi tetapi sebaliknya jika yang dinikahi lebih dulu adalah bibi, maka harus minta izinnya untuk menikahi kemenakan.¹¹³

Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan dari istri yang telah dicerainya dengan *talak raj’i* sampai masa iddahnya berakhir, adapun jika talaknya adalah *talak ba’in* para ulama berbeda pendapat.

Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa selama istri sedang dalam masa iddah maka haram hukumnya laki-laki menikahi saudara istrinya tersebut baik talaknya berupa *talak raj’i* maupun *talak ba’in*. Ulama Syi’ah, Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi saudara dari istri yang telah ditalaknya jika talak yang jatuh adalah talak ba’in baik sebelum masa iddah istri berakhir ataupun belum.¹¹⁴

b) Larangan poligami di luar batas

¹¹²Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj, *Terjemah Shahih Muslim*, h.135.KH. Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim*, h. 762, hadis no. 33.

¹¹³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, h. 125.

¹¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 479.

Batas poligami dalam Islam adalah empat orang, maka seorang laki-laki yang telah memiliki istri empat tidak boleh menikah dengan perempuan kelima, kecuali sudah menceraikan istrinya dengan talak ba'in. Batasan poligami ini terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3.

c) Larangan karena adanya ikatan perkawinan

Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih bersuami sehingga menutup peluang terjadinya poliandri. Ketentuan ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24.

d) Larangan karena sedang dalam masa iddah

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya harus menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Masa ini disebut iddah. Bagi perempuan yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah tiga kali suci, yang tidak haid tiga bulan, yang bercerai karena mati iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari sedangkan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228, at-alaq ayat 4.¹¹⁵

e) Larangan karena talak tiga

Seorang perempuan yang dicerai dengan talak tiga oleh suaminya haram bagi bekas suaminya tersebut sebelum ada penyela/*muhallil*. Dalam hal ini semua ulama mazhab sepakat dan mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230.¹¹⁶

f) Larangan karena ihram

¹¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 464. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 304-305.

¹¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 453.

Mazhab Malik, Syafi'i, Imam al-Auza'i dan Imam Ahmad melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang ihram berdasarkan hadis dari Usman yang diriwayatkan oleh Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يَزَوجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى إِبَّانَ بْنِ عُثْمَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ سَمْعَةَ عُثْمَانَ بْنُ عَقَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata: Kudapatkan dari Malik dari Nafi’ dari Nubaih bin Wahab dari Umar bin Abdullah ketika Thalhah bin Umar ingin menikahi anak perempuan Syaibah bin Jabir, maka telah mengirimkan kabar kepada Aban bin Usman yang hadir ketika itu dan dia adalah pemimpin Jama’ah Haji, Aban Berkata aku mendengar usman bin Affan berkata Rasulullah SAW. Bersabda orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, dinikahkan atau melamar” (H.R. Muslim).¹¹⁷

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang perempuan yang sedang ihram boleh menikah berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ (وَهُوَ مُحْرِمٌ)

Artinya:

“Bahwasanya Nabi SAW mengawini Maimunah yang saat itu sedang ihram” (H.R.Muslim)¹¹⁸

g) Larangan menikahi pezina

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah. Larangan menikahi pezina sampai ia

¹¹⁷Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj, *Terjemah Shahih Muslim*, h. 137.KH. Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim*, terj. *Shahih Muslim*, h. 765, hadis no. 41.

¹¹⁸Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj, *Terjemah Shahih Muslim*, h. 137.Zaki al-Din Abd.Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta:Mizan, 2002), h.438, hadis no. 815.

berhenti melakukannya dan bertaubat tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3.¹¹⁹

h) Larangan karena beda agama

Semua 'Ulama' mazhab sepakat mengenai keharaman seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal hukum seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim. Berdasarkan al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 5, empat mazhab Sunni sepakat bahwa perempuan ahli kitab dari golongan Nasrani dan Yahudi halal bagi laki-laki muslim sedangkan Syi'ah melarang hal itu.¹²⁰

Konsep kemahraman juga terdapat dalam perundang-undangan di Negara kita. Perundang-undangan yang dimaksud adalah hukum tertulis yang masih diberlakukan hingga saat penelitian dilakukan.

1. Undang-undang No. I Tahun 1974

Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan pada tanggal 02 Januari 1974 dan masuk dalam Lembar Negara dengan No. I Tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, UUP No. I Tahun 1974 diberlakukan, dan dapat berlaku secara efektif sejak 01 Oktober 1975.¹²¹

Ketentuan UUP No. I Tahun 1974 pasal I ayat I menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing" Dengan demikian orang Islam harus menggunakan tata cara menurut hukum Islam ketika melakukan pernikahan. Meskipun demikian beberapa

¹¹⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 129-130.

¹²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 336. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 133.

¹²¹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.

ketentuan perkawinan tetap dimuat dalam undang-undang tersebut, diantaranya adalah masalah mahram.

Masalah mahram dibahas dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 UUP No.I Tahun 1974 dengan istilah larangan perkawinan.

2. Pasal 8 UUP No. I Tahun 1974

Dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam satu garis lurus kebawah atau keatas
- b. Berhubungan darah dalam satu garis menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya atau neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri, yaitu saudara kandung, bibi atau kemenakan istri.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain dilarang.

3. Pasal 9 UUP No. I Tahun 1974

Seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi. Hal ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki, tetapi ada pengecualian bagi laki-laki yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

4. Pasal 10 UUP No. I Tahun 1974

Antara suami istri yang telah dua kali bercerai tidak boleh menikah lagi sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam agamanya.

5. Pasal 11 UUP No. I Tahun 1974

Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya mempunyai masa tunggu tertentu yang diatur oleh negara melalui hakim jika tidak ada ketentuan dalam agama.

Ketentuan UUP No. I Tahun 1974 yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah mengenai larangan bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang berhubungan saudara dengan istri, terdapat dalam pasal 18 huruf e yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: “berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang”

Pasal 2 ayat 1 UUP No.I Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa sahnya perkawinan adalah bila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 49 ayat I UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa dalam masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam maka Pengadilan Agama yang berhak menyelesaikan jika terjadi sengketa. Hukum Islam termuat dalam berbagai bentuk kitab fiqih yang memberi peluang perbedaan sangat besar. Oleh karena itulah loka karya para ‘Ulama’ pada tanggal 2-5 Februari 1988 dikukuhkan dengan Inpres No.I Tahun 1991 menghasilkan Kompilasi Hukum Islam yang dipakai sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. KHI tetap dapat disebut sebagai salah satu hukum positif meskipun tidak/belum sampai pada tingkat undang-undang.¹²²

KHI membahas *mahram* dengan istilah “Larangan Kawin” yang ketentuannya termuat bab VI pasal 39, 40, 41, 42, dan 43.

¹²²A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 121-130.

6. Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan karena

- a. Pertalian Nasab, yaitu ibu, nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; saudara kandung, seayah, seibu; bibi
- b. Pertalian Kerabat Semenda, yaitu mertua, ibu tiri, anak tiri kecuali belum terjadi percampuran dengan istri, menantu
- c. Pertalian Sesusuan, yaitu ibu susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; saudara sesusuan dan seterusnya dalam satu garis lurus ke bawah; saudara perempuan dari saudara sesusuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah; bibi susuan, nenek susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; anak yang disusui istrinya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

7. Pasal 40

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* dari perceraian dengan orang lain dan seorang perempuan yang tidak beragama Islam.

8. Pasal 41

Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan perempuan yang berhubungan saudara sesusuan atau nasab dengan istrinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu serta keturunannya; juga bibi atau kemenakannya.

9. Pasal 42

Seorang laki-laki dilarang menikahi istri kelima, dalam hal salah satu istri yang empat sudah dicerai dengan talak *raj'i* harus menunggu masa *iddah*nya.

10. Pasal 43

Seorang laki-laki dilarang menikahi istri yang sudah ditalak tiga sebelum ada penyela dan dengan bekas istri yang dili'an.

11. Pasal 44

Seorang perempuan Islam tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Larangan kawin dalam KHI yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat pada pasal 41, yakni tentang larangan memadu istri dengan saudara, baik sesusuan, kandung, bibi dan kemenakan.

2. Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI

Istilah Donor menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah “*Penerima* atau *Pemberi sumbangan*.”¹²³Sedangkan ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu. Jadi pengertian Donor ASI sebagaimana Donor Darah yaitu orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu yang membutuhkan.¹²⁴

Donor ASI atau Persusuan oleh selain ibu telah dipraktekkan masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam dan terus berlanjut dalam masa keislaman. Rasulullah sendiri ketika kecil disusui oleh Halimah al-Sa'diyah. Rasulullah sendiri mengisyaratkan pengakuan terhadap persusuan oleh perempuan selain ibu, sebagaimana tampak dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِي إِهْمًا ابْنَةً أُخِي مِنْ الرِّضَاعَةِ . وَ يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya:

“Riwayat dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi SAW dikehendaki untuk menikah dengan anak Hamzah, beliau menjawab: Dia (anak Hamzah) haram bagiku

¹²³<http://kamusbahasaIndonesia.org/donor> diakses 1 agustus 2014.

¹²⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 279.

karena dia anak saudara sesusuanku Diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena hubungan darah (nasab)”

Hadis di atas menceritakan mengenai perjodohan Nabi Muhammad dengan anak Hamzah, paman Nabi Muhammad, yang ditolak oleh Nabi Muhammad. Beliau menolak karena Hamzah, meskipun paman, tetapi juga saudara sesusuannya. Nabi Muhammad pernah disusui oleh Tsaubah, hamba Abu Lahab, yang sebelumnya pernah menyusui Hamzah.¹²⁵

Konsekuensi yang lahir dari persusuan adalah munculnya larangan dan kebolehan dalam beberapa hal. Hal yang dilarang akibat hubungan persusuan adalah pernikahan, yaitu antara anak yang disusui dengan 1) ibu susu, 2) ibu dari ibu susu, 3) ibu dari bapak susu, 4) saudara ibu susu, 5) saudara bapak susu, 6) cucu dari ibu susu, dan 7) saudara sesusuan.¹²⁶ Hal yang diperbolehkan akibat hubungan persusuan adalah bolehnya melihat wajah, berkhilwat, dan melakukan perjalanan bersama perempuan bukan mahram.¹²⁷ Kebolehan berkhilwat itu didasarkan atas hubungan persusuan, yaitu persusuan di masa kecil sehingga susu tersebut bisa mengenyangi, sebagaimana disebutkan oleh hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُصُ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّ أَخِي فَقَالَ انْظُرْ مِنْ أَخِي أَنْتَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

“Riwayat dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW masuk (menemui) Aisyah ketika di tempat Aisyah ada seorang laki-laki. Tampak wajah Nabi Muhammad berubah, sepertinya beliau tidak berkenan Aisyah lalu berkata: “Dia saudaraku”. Nabi Muhammad menjawab: “Lihatlah siapa yang menjadi

¹²⁵Lihat Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Jilid II. (Semarang: Toha Putera, [t.th]), h. 217.

¹²⁶Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 66.

¹²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 66.

saudaramu. Sesungguhnya persusuan itu berdampak hukum jika terjadi [karena lapar.”

Hadis di atas menunjukkan untuk masalah *radla'ah*, Rasulullah menegaskan bahwa persusuan yang membawa dampak berupa hubungan persaudaraan adalah persusuan yang dilakukan ketika susu yang diminum mengenyangi rasa lapar. Menurut Mustafa Dib al-Bigha, persusuan yang mengenyangi rasa lapar hanya terjadi pada masa susu membuat seseorang merasa lapar (ketika tidak meminumnya) dan merasa kenyang (setelah meminumnya). Hal itu hanya terjadi pada masa kecil.¹²⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerima dan pendonor ASI memiliki status kemahraman.

¹²⁸Mustafa Dib al-Bigha, *Al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*. (Surabaya: al-Haramain, [t.th]), h.

BAB IV

PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG BANK ASI

A. *Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI*

1. Pendapat Ulama yang Membenarkan Adanya Bank ASI

Alasan ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI sebagai berikut: Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusui ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar semacam Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “Bank ASI.” Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *mashlahat syar’iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau cenderung mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.¹²⁹

Senada dengan pandangan diatas, ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran

¹²⁹Irmawati, Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) daerah blang padang tahun 2013, http://180.241.122.205/dockti/IRMA_WATI-kti.pdf. h. 9 Diakses pada 2 agustus 2014.

nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari. Prof.DR. Ali Mustafa Ya'qub, MA., salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan Bank ASI dan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. "Hanya saja Islam mengatur, jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain ibu si bayi meninggal maka si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam dalam situasi tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti, kendatipun zaman nabi memang tidak ada susu formula tapi susu kambing dan sapi sudah ada." Ini berarti bahwa mendirikan Bank ASI dan donor ASI boleh-boleh saja karena memang Islam tidak mentoleransi susu yang lain selain susu Ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya. Hanya saja pencatatannya harus benar dan kedua keluarga harus dipertemukan serta diberikan sertifikat. Karena 5 kali meminum susu dari ibu menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak mereka tidak boleh menikah.¹³⁰

2. Pendapat Ulama yang tidak Membenarkan Bank ASI

Alasan para ulama untuk tidak membenarkan Bank ASI bahwa Bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank ASI adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan *Majma' al-Fiqih al-Islamiy* melalui Badan Muktamar Islam yang

¹³⁰Irmawati, Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) daerah blang padang tahun 2013, h. 10.

diadakan di Jeddah pada tanggal 22–28 Desember 1985 M./10–16 Rabiul Akhir 1406 H.. Lembaga ini dalam keputusannya (*qarar*) menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.

B. *Konklusi Hukum seputar keberadaan Bank ASI*

Bank ASI sebagai lembaga penyalur donor ASI memiliki manfaat, baik bagi pendonor ASI, agar ASI yang dimilikinya tidak terbuang sia-sia, juga bagi si bayi penerima ASI agar dapat memenuhi kebutuhan ASI dan gizinya yang belum dapat dipenuhi oleh ibu kandungnya, karena alasan sakit atau menunggal dunia. Manfaat lainnya adalah membangun rasa solidaritas untuk saling berbagi antar sesama.

Namun terlepas dari manfaat tersebut donor ASI berdampak pada terbentuknya ikatan emosional antara ibu susu yang menjadi pendonor dengan seorang bayi peneriman donor, hal ini disebabkan karena si bayi penerima donor ASI akan mendapatkan sebagian sifat ibu yang mendonorkannya.

Hal ini diperjelas oleh dr. dian N. Basuki, MD, MSC, IBCLC, tentang DNA pada protein ASI bahwa, “Dalam DNA, banyak sifat-sifat manusia yang dibawa. Termasuk ada zat antibody. Jadi, anak yang mendapatkan ASI donor, disatu sisi ia juga mendapatkan sebagian dari sifat ibu yang mendonorkan.”¹³¹

Permasalahan Bank ASI jika dikembalikan kepada hukum dasar persusuan maka memiliki konsekuensi-konsekuensi yang perlu mendapat perhatian dari umat Islam. Meringat ajaran serta syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga soal kehormatan dan keturunan.

¹³¹Tabloid Mom and Kiddie, *Donor ASI, Selamatkan Bayi-Bayi Kurang Beruntung*. Ed. 10th V 20 desember 2010-02 Januari 2011, h. 10.

Dalam praktiknya di dunia barat, Bank ASI dalam prosedurnya menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dan ibu susu, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Jika terjadi pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalat, sebagaimana dikatakan dalam kaidah ushul *“Larangan dalam muamalah menunjukkan atas batalnya hal yang dilarang jika larangan tersebut menyangkut substansi akad”*

Pada dasarnya, Bank ASI dalam kedudukan adalah sebagai sarana atau media bagi terjadinya hubungan persusuan. Dengan kedudukan demikian, maka hukum Bank ASI adalah netral. Namun sarana ini dapat bergerak ke hal yang *mudharat* sesuai dengan tujuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Sebagaimana prinsip dalam hukum Islam, *sadd al-dzariah* (menutup jalan yang membawa kepada mudharat dan larangan).

Ketidakjelasan hubungan persusuan sebagai akibat percampuran susu merupakan persoalan Bank ASI. Hal ini karena akan menimbulkan pertanyaan seputar konsekuensi hukumnya.

Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tanggal 27 juli 2010 telah mengeluarkan 7 (tujuh) Fatwa baru, termasuk diantaranya adalah masalah Bank Sperma dan Bank ASI sebagai berikut:

1. Mendonorkan dan atau menjualbelikan sperma hukumnya HARAM karena bertentangan dengan hokum islam dan akan menimbulkan kekacauan asal-usul serta identitas anak.
2. Mendirikan bank sperma dengan tujuan seperti tersebut di poin satu hukumnya HARAM Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.
- b. Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil.
- c. Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat.¹³²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus melakukan kajian mengenai pendonoran ASI. Menurut Sholahudin al-Ayyub selaku wakil sekretaris komisi fatwa MUI, mengatakan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mendonorkan ASI. Apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya HARAM. Sejumlah syarat-syarat tersebut diantaranya yaitu:

1. Harusnya ada pembicaraan antara pendonor ASI dengan ibu kandung, ini dilakukan agar terjadi kejelasan nasab (keluarga). Yang nantinya akan menjadi keluarga persusuan.
2. Pendonor harus dalam keadaan sehat.
3. Anak yang menerima donor ASI harus berusia kurang dari 2 (dua) tahun.
4. Pemberian ASI benar-benar dalam keadaan darurat.

Menurutnya juga “Ketentuan itu harus terpenuhi semuanya, ini ditakutkan terjadinya pembentukan darah sehingga dikhawatirkan akan terjadi penularan penyakit menular atau keturunan yang diberikan pendonor ASI”.¹³³

Praktek bank ASI adalah praktek penyampaian susu dari ibu donor kepada anak yang membutuhkan, ketika air susu diminum oleh anak yang berusia kurang dari atau sama dengan dua tahun, maka air susu tersebut menimbulkan hubungan

¹³²https://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&itemid=78 diakses pada tanggal 14 agustus 2014.

¹³³<http://news.okezone.com/read/2010/11/30/337/398569/mui-haramkan-donor-air-susu-ibu> diakses tanggal 14 agustus 2014.

hukum, baik susu tersebut dicampur dengan susu dari banyak perempuan/ibu atau pun dari satu perempuan/ibu saja. Hubungan hukum yang timbul adalah terjadinya larangan menikahi sebagaimana larangan untuk menikahi saudara berdasarkan hubungan *nasab*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Radha'ah* perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seseorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan merangsang otak seorang anak. Ulama fiqh mendefinisikan arti anak yang belum mencapai umur dua tahun dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima.
2. Dalam donor ASI perlu diperjelas identitas pendonor dan penerima donornya. Kerana bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu itu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri.
3. Alasan Ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI ialah karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sedangkan bank ASI, sang bayi hanya mengambil susu yang sudah dikemas, sedangkan Ulama yang tidak membenarkan ialah karena bank ASI sudah menganut sistem jual beli juga tidak jelas identitas seorang pendonor Bank ASI, sehingga ditakutkan tercampurnya nasab, sedangkan Islam menganjurkan untuk menjaga nasab dengan baik.

B. Saran

1. Perlu adanya informasi kepada pemberi donor ASI tentang identitas penerima ASI dan sebaliknya dan adanya bukti serah terima ASI untuk menghindari untuk terjatuh dalam praktek yang dilarang agama, dan

2. Dalam perosedurnya, bank ASI perlu menghindari percampuran ASI antara satu ibu susu dengan lainnya yang potensial mengaburkan hubungan persusuan. Komersialisasi ASI pada dasarnya adalah perbuatan mubah dan menyangkut persoalan sarana (*wasilah*). Namun perbuatan mubah tersebut harus dilakukan dengan tidak menimbulkan resiko terjadinya pelanggaran atas larangan Islam, khususnya menyangkut hubungan kekerabatan dan hubungan pernikahan.
3. Bank ASI pada dasarnya bersifat komersil, namun dalam penerapannya diharapkan tidak menimbulkan resiko terjadinya kekaburan nasab yang berdampak pada pernikahan antar saudara sepersusuan, yang dimana kita ketahui merupakan larangan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu. Alih Bahasa Abdul Rakhman*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- Abidin, Zainal. *Persengketaan Suami-Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu bagi Bayi (Studi Analisa Pasal 104 ayat 2 KHI)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2002.
- Ahmad, Abd Kadir. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data". Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin. Makassar: [t.p], 2012.
- Ad-Daruqutniy, Al-Hafiz 'Ali Ibn 'Umar. *Sunan Ad-Daruqutniy*. Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, [tt]
- Al-Andulusiy, Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. Juz I, [t.tp.: t.p.,t.t]
- Al-Ansari, Zakariya. *Fath Al-Wahhab*. Bairut: Dar Al-Fikr, [t.t], II: 112.
- Al-Bigha, Mustafa Dib. *Al-Tadzhib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrir*. Surabaya: Al-Haramain, [t.th].
- Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn Al-Husain. *Kitab As-Sunan As-Sagir*. Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Madhahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001.
- Al-Maqarin, Lajnah Min Asatizhi Qismi Al-Fiqh. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'Asharah*. Juz I, 2006.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Edisi II, Cet XXV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Mundziriy, Zaki Al-Din Abd. Azhim. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Mukhtashar Shahih Muslim. Jakarta: Mizan, 2002.
- Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani. *Subul Al-Salam*, Juz III, Jilid II. Semarang: Toha Putera, [t.th].
- An-Nisaburi, Abu Husein Bin Hajjaj Al-Qusyairi. *Terjemah Shahih Muslim*. Juz II, KH. Abid Bisri Mustofa. Semarang: As-Syifa', 1993.
- Anis, Ibrahim. *Kamus Al-Washit*. Mesir: Dar Al-Qalam, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- As-Syaukani, Muhammad Ibn Muhammad. *Nail Al-Authar*. Juz VII, Beirut: Dar Al-Jil, 1995.
- At-Tayyib, Abi. 'Aun Al-Ma'bud. Jilid III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990.
- Aziz, Zainuddin Bin 'Abdul. *Fatkhul Mu'in Bisyarhil Qurratal 'Ain*. Indonesia: Dar Al-Kutub Al-Ihya'i Al-Kutub Al-'Arabiyyah.
- Borman, dan Jan Kennaugh MD1 Laraine Lockhart. [t.th.] "The Increasing Importance of Human Milk Banks." *E-Journal of Neonatology Research*. Dimuat dalam <http://www.neonatologyresearch.comwp->

contentuploads201109Human-MilkBanking2.pdt. diunduh tanggal 22 juli 2014.

Burhanuddin. *Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi*. Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2013.

Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

FDA Working Group. “Backgrounder on Banked Human Milk”. Dalam www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM235642.pdf diunduh tanggal juli 2014.

Gronn, dan Anne Hagen Grovslien, Morten. 2009. “Donor Milk Banking and Breastfeeding in Norway. ” *Journey of Human Lactation*. J. Hum lact. 25 (2) Sebagaimana diunduh dari http://www.eatsonfeets.org/docs/Donor_Milk_Banking_and_Breastfeeding_in_Norway.pdf pada tanggal 22 juli 2014.

Haekal, Muhammad Husain. *Hayat Muhammad*. Alih Bahasa, Ali Audah, Jakarta: Pustaka Lintera Antarnusa, 2001.

Hammam, Ibnu. *Syari'ah Fath Al-Qadir*. Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1995.

Hans, dan Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe. 2010. “Human Milk Banks: The Benefits and issues in an Islamic Setting.” *Eastern Journal of Medicine* 15.

Hassan, A. ”*Risalah Al Mazhab-Mansur, kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, [t.th].

https://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&itemid=78. Diakses pada tanggal 14 agustus 2014.

<http://news.okezone.com/read/2010/11/30/337/398569/mui-haramkan-donor-air-susu-ibu>. Diakses pada tanggal 14 agustus 2014.

http://180.241.122.205/docti/IRMA_WATI-kti.pdf. h. 9 diunduh pada tanggal 2 agustus 2014.

<http://kamusbahasaIndonesia.org/donor> diakses 1 agustus 2014.

Koenig, Samuel. *Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology*. Cet. I, New York: borner Van Noble Inc, 1957.

- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini*. Cet.V, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Malik Bin Anas, *Kitab Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- _____. *Al-Muwatta' Imam Malik*, terj. *Al-Muwatta' Lil Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qawal Qadim dan Qawi Jadid*. Cet. II, Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera, 2010.
- _____. *fiqh Lima Mazhab*, terj. *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Khamsah*. Jakarta: kencana, 2001.
- Munir. *Pemikiran Hadis-Hadis Radha'ah dalam Kitab Tausir Allam, Subul Al-Salam dan 2002 Mutiara Hadis*. Al-Fikr, Volume 16 No. 1, 2002.
- Mustafa, KH. Adib Bisri. *Shahih Muslim*. Terj. *Shahih muslim*. Semarang: CV. Asy_Syifa, 1993.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT Arkola Surabaya.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Unisba, 1995.
- Qayyim, Ibnu. *Jami' Al-Fiqh*, Juz VI. Kuwait: Dar Al-Wafa', 2005.
- _____. *Zad Al-Ma'ad*, juz V, Kuwait: Al-Mannar Al-Islamiyyah, 1992.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Ed.II. Chicago-London: Chicago University Press, 1979.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fikih Sunnah*. Jilid II dan III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sa'adah, Khotimatus. "*Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qardawi)*". Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2004.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Cet.I, Edisi I. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sutanto, Mia. *Aimi Mak Comblang Asi Eksklusif*. <http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-ekslusif> diakses pada tanggal 22 juli 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: kencana, [t.th].
- Syafi'i. *Ar-Risalah*. Jakarta: pustaka Firdaus, 1986.
- Syah, Muhammad Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syukur, H.M. Asywadie. *Perbandingan Mazhab*. Cet. II, Surabaya: Bima Ilmu, 1982.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011

Uman, Cholil. *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Cet. II. Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zallum, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita selekta Hukum Islam*. [t.tp.: t.p.,t.t]

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Ad'illatuhu*. Juz X. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Ma'sir, 1998.

RIWAYAT HIDUP



Penyusun bernama lengkap Desrikanti BK, lahir di sebuah kota yang dulunya bernama Ujung Pandang dan Sekarang Lebih dikenal dengan Kota Makassar. 23 Desember 1992.

Penyusun mengenyam pendidikan sekolah dasar di tiga tempat yang pertama SDN Bawakaraeng Makassar, yang kedua SD Muhammadiyah Sorong dan yang terakhir di SD Inpres 141 lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sorong dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Sorong dan lulus pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 penyusun merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan diterima di salah satu perguruan tinggi di Makassar yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan penyusun mengambil jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum. Dan menyelesaikan studi strata 1 pada tahun 2014.